

**PERKEMBANGAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH DI
KABUPATEN BIREUEN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AFZALUL FATHA

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam
NIM. 220501002



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026/1448**

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI (S-1)

**SEJARAH PERKEMBANGAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH
DI KABUPATEN BIREUEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan humaniora
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Bebas Studi Program
Sarjana (S1) Sejarah dan Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh :

AFZALUL FATHA
NIM. 220501002

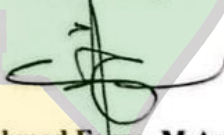
Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag
NIP. 196303021994031001


Ahmad Fauza, M.Ag
NIP. 197503192025211022

Disetujui Oleh Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam


Ruhamah, M.Ag.
NIP. 197412242006042002

**PERKEMBANGAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN
BIREUEN**

SKRIPSI

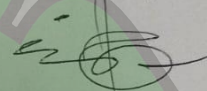
Telah Diuji Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Dan di Nyatakan Lulus Serta
diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal : 26 Agustus 2026
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag
NIP. 196303021994031001

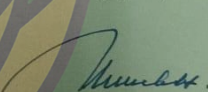
Sekretaris,


Ahmad Fauzan, M.Ag.
NIP. 197503192025211022

Penguji I,

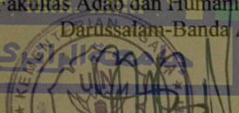

Asmanidar, M.A.
NIP. 19771231200702001

Penguji II,


Drs. Anwar Daud, M.Hum
NIP. 1962123119910110002

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Syarifuddin, M.Ag., Ph.D.

NIP. 197001011997031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Afzalul Fatha
2. NIM : 220501002
3. Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam
4. Fakultas : Adab dan Humaniora

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya ajukan kepada prodi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dengan Judul:

Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen

Merupakan **Hasil Karya Sendiri dan Bukan Plagiasi**. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku pada Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 tahun 2010 terkait pencegahan dan pelanggaran plagiat di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2026

sembuat pernyataan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

METERAI
TEMPEL

Afzalul Fatha

DAFTAR TABEL

4.1 Persebaran Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen.....	37
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan
- Lampiran II : Surat Penelitian
- Lampiran III : Daftar Pertanyaan
- Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran V : Daftar Informan
- Lampiran VI : Dokumentasi



ABSTRAK

Nama : Afzalul fatha
Nim : 220501002
Fakultas/Prodi : Adab dan humaniora/Sejarah kebudayaan islam
Judul : Sejarah Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di kabupaten Bireun
Pembimbing I : Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M. Ag
Pembimbing II : Ahmad fauzan, M.Ag

Kata kunci: Muhammadiyah, Perkembangan Organisasi, Kabupaten Bireuen.

Penelitian ini berjudul “Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah awal masuk dan perkembangan organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen, perkembangan cabang dan ranting Muhammadiyah, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perkembangan organisasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan. Pertama, perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen berlangsung secara bertahap melalui kegiatan dakwah, pengajian, pendidikan, dan pelayanan sosial. Perkembangan tersebut ditandai dengan terbentuknya cabang Muhammadiyah di beberapa kecamatan. Kedua, permasalahan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang memengaruhi pelaksanaan dakwah, pembinaan organisasi, serta pengembangan amal usaha. Permasalahan tersebut muncul dari faktor internal organisasi maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat. Dinamika tersebut menjadi bagian dari perjalanan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang menjalankan gerakan dakwah dan pembaruan di tengah masyarakat Bireuen. Ketiga, organisasi Muhammadiyah Kabupaten Bireuen memiliki harapan agar organisasi terus berkembang sebagai gerakan Islam yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan kaderisasi menjadi salah satu harapan utama yang terus disampaikan oleh pengurus. Harapan berikutnya berkaitan dengan pengembangan amal usaha Muhammadiyah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, harapan lain diarahkan pada terciptanya hubungan yang semakin harmonis dengan seluruh elemen masyarakat.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt. yang Maha Menggenggam hati hati manusia, Maha suci Allah yang telah menurunkan Dinul Islam sebagai pedoman hidup manusia. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada manusia termulia Baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah menjadi teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Dengan nikmat sehat, kesempatan, izin, dan ridhaNya penulis dapat menyelesaikan Proposal skripsi dengan judul ***“Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen”***.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 nantinya, pada Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ucapan terimakasih kepada :

Bapak Syarifuddin, M.Ag., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan wakil dekan beserta staffnya yang telah banyak membantu dalam proses dan kelancaran proposal skripsi ini.

Ibu Ruhamah, M.Ag., dan Ibu Hamdinah Wahyuni M.Ag., selaku ketua dan sekretaris program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam serta seluruh dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Bapak Prof, Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag. dan Ahmad fauzan, M.Ag. selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu memberikan masukan-masukan serta saran yang dapat membantu dalam proses bimbingan skripsi ini.

Teristimewa kepada Kedua orang tua, yang tidak ada hentinya memberikan ribuan cintanya, dukungan, dan do'a yang terbaik kepada penulis yang tak terhitung jumlahnya. Beserta saudara-saudara dan saudari, dan keluarga besar penulis yang sangat penulis cintai, yang telah memberikan do'a, dukungan dan bantuan baik moril maupun materil selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari setiap pembaca, agar dapat memberikan dan menghasilkan penulisan karya ilmiah yang lebih berkualitas kedepannya. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk ikut serta dalam membantu penulis. Semoga Allahh SWT membalas dan mempermudah segala urusan duniawi dan ukhrawi kita semua *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 18 Agustus 2026
Penulis

Afzalul fatha
220501002

OUTLINE

LEMBARAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	2
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Penjelasan Istilah	6
1.6. Kajian Pustaka	8
1.7. Metode Penelitian.....	11
1.8. Sistematika Penulisan	14
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	18
2.1 Konsep Organisasi Kemasyarakatan Islam	18
2.2 Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam	22
2.3 Perkembangan Organisasi Muhammadiyah.....	24
2.4 Indikator Perkembangan Organisasi	26
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Bireuen	29
3.2 Kondisi Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Bireuen	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen...36	
4.2 Bentuk-Bentuk Permasalahan dan Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen	50
4.3 Harapan Organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen.....	56
BAB V PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aceh terletak di ujung pulau Sumatera, Aceh sekarang merupakan salah satu Provinsi dalam Negara Indonesia yang disebut Aceh. Aceh sebelum bergabung dengan Indonesia (NKRI) pada tahun 1945 merupakan wilayah kerajaan Islam yang beribukota di Banda Aceh.¹ Pada abad ke 17 M Aceh selalu dilihat sebagai contoh bagi Islam di Indonesia, terutama selama masa kepemimpinan sultan Iskandar Muda yang suka berperang. Kabupaten ini ber ibukota di Kota Juang.

Kabupaten ini resmi berdiri 12 oktober 1999 dengan dasar hukum UU. RI No. 48 Tahun 1999. Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.901,20 km persegi dengan pembagian administratif yakni 17 Kecamatan dan 609 Desa. Kabupaten Bireuen termasuk salah satu kabupaten yang bersejarah bagi bangsa ini. Kabupaten ini pernah ditetapkan sebagai ibukota Republik Indonesia kedua ketika terjadi Agresi Militer Belanda II pada tanggal 18 Juni 1948, yang semulanya di Kota Bukittinggi ke Kabupaten Bireuen.²

Wilayah Kabupaten Bireuen terletak antara 04° 53' 20,3" 05° 16° 25,8" Lintang Utara dan 96° 55' 30,1"-96° 19' 45,9" Bujur Timur serta berada pada ketinggian 0-2637 meter dari permukaan laut (MDPL). Kabupaten Bireuen

¹ M. Hasbi Amiruddin, *Aceh dan Serambi Makkah*, (Banda Aceh Yayasan Pena, 2006), hlm. 14

² Ahmad Suryadi, S.pd, *Menapak Indonesia : Menelusuri Setiap Provinsi, Kabupaten Dan Kota Seluruh Indonesia. Jilid I (Pulau Sumatera)*. (Sukabumi : Cv Jejak, April 2021) hlm. 35-36

di kawasan perlintasan jalan nasional lintas pulau Sumatera juga merupakan nilai strategis yang perlu dimanfaatkan sebagai peluang bagi daerah ini untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Dalam posisi tersebut, Kabupaten Bireuen diharapkan menjadi suatu kawasan pertumbuhan ekonomi di kawasan pantai timur Aceh.³

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 09 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M. Organisasi ini didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan tepatnya di Kauman, Yogyakarta. Berdirinya Muhammadiyah merupakan atas dasar permintaan dari sahabat dan murid-murid K.H. Ahmad Dahlan. Secara umum faktor berdirinya Muhammadiyah disebabkan kegelisahan dan ketidaktenangan social religius dan moral.⁴

Selanjutnya, Organisasi ini pertama sekali masuk ke Aceh (Kutaraja) pada tahun 1923 dibawa oleh bekas sekretaris Muhammadiyah cabang Betawi S. Djaja Suekarta yang pindah ke Kutaraja dan bekerja pada perusahaan Jawatan Kereta Api Aceh. Karena keadaan waktu itu belum memungkinkan mendirikan sebuah cabang, karena personalia pengurus belum ada maka baru dapat didirikan pada tahun 1927. Pendirian ini mendapat bimbingan langsung dari seorang utusan pengurus pusat Muhammadiyah yang bernama A. R. Soetan Mansur.

Kehadiran Muhammadiyah di Aceh tidaklah disambut dengan tangan

³ Syahabuddin, *Ikjip (Laporan kinerja Instansi Peerintah Kabupaten Bireun Tahun 2019)*. (Bireun. Inspektorat, 2020). hlm. 5.

⁴ Faizal Hamzah dkk, "The Histori Of Muhammadiyah", *Jurnal Journal Of Indonesian History* 11, no. 1 (2003): 27-32

terbuka, di manapun muncul selalu ada tantangan dan rintangan. Karena organisasi ini ingin menembus kejumudan, khurafat dan bid'ah yang telah terbentuk dan tersebar selama berabad-abad.⁵

Di Bireuen Organisasi ini menjadi korban intoleransi oleh internal umat beragama yang diamini negara. Tahun 2015, warga yang mengaku kelompok Ahlus Sunnah Sal Jamaah (Aswaja), menghalang-halangi dan melakukan teror terhadap proses pembangunan Masjid Muhammadiyah di Kecamatan Juli, Bireuen. Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, pada 17 Februari 2015, sempat menolak memberikan rekomendasi kepada panitia pembangunan masjid.

Adapun, penolakan izin pendirian Masjid Muhammadiyah tersebut terlihat janggal, sebab semua persyaratan administrasi telah dipenuhi, termasuk dokumen berupa fotokopi KTP dan tanda tangan minimal 60 orang. Masyarakat bahkan menyerahkan 150 KTP dan dukungan. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan juga sudah didapatkan dari kepala desa (keusyik), camat, dan sekretaris daerah Kabupaten Bireuen. Setelah melewati ujian berliku, Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Juli kini telah berdiri dan mulai digunakan sejak juli 2019.

Terkait landasan ini, peranan pemerintah sangat dekat untuk menjaga kerukunan antar muslim di wilayah Bireun dan peranan aparaturnya keamanan seperti polisi, tentara maupun Wilayatul Hisbah (WH) untuk menjaga ketertiban supaya umat muslim dapat melaksanakan aktivitas keagamaan secara aman dan damai.⁶ Bireun seharusnya menjadi contoh daerah yang aman dan damai,

⁵ Arifin Zain dkk, "Internalisasi Nilai-nilai Modelnitas Dalam Gerakan Dakwah Organisasi Muhammadiyah Di Aceh". *Jurnal Al-Idarah* 1, no. 1 (2017): 22-24

⁶ Hasil Wawancara dengan Fauzan Azima, pada tanggal 27 April 2025.

terebih di sana terdapat banyak sekali pesantren bahkan salah satu kecamatannya dijuluki “ Kota Santri “.

Dengan demikian, seperti yang telah dijelaskan di atas, agar penulis dapat mengetahui proses dalam mewujudkan kembali nilai keharmonisan sesama umat islam di wilayah Kabupaten Bireun, maka dari itu penulis tertarik untuk mengamati dan mengkaji kembali secara lebih teliti dan detail mengenai “Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireun”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan organisasi Muhammadiyah di Bireun?
2. Apa saja permasalahan organisasi Muhammadiyah di Bireun?
3. Apa saja harapan terbesar organisasi Muhammadiyah di Bireun di masa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan organisasi Muhammadiyah di Bireun
 2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk permasalahan organisasi Muhammadiyah di Bireun.
 3. Untuk mengetahui harapan organisasi Muhammadiyah di Bireun di masa yang akan datang.
-

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman ilmiah kepada pelajar, mahasiswa/i serta masyarakat luas tentang khazanah perkembangan organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas mengenai Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Bireuen Agar masyarakat luas dapat mengetahui bahwa Organisasi ini di wilayah bireuen khususnya Samalanga tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan .
- b) Memberikan wawasan pemahaman tentang Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Bireuen. Dan untuk mengetahui penyebab Organisasi muhammadiyah perkembangnya relatif lambat dan langkah-langkah yang harus di tempuh untuk mencapai kemajuan Organisasi tersebut.
- c) Memberikan bahan masukan yang bermanfaat kepada masyarakat luas, baik kalangan muda seperti pelajar ataupun mahasiswa/i serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Muhammadiyah sebagai Organisasi islam yang berdaarkan al quran dan sunnah serta berupaya mewujudkan nilai nilai keislaman melalui pendidikan dan pelayanan sosial.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kata-kata yang memiliki arti umum maka peneliti ingin

menjelaskan kata istilah kedalam sebuah pengertian.

1. Perkembangan

Perkembangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses bertambahnya sesuatu menuju ke arah yang lebih baik atau sempurna. Secara umum, perkembangan juga proses berkembangnya sesuatu. Perkembangan disini meliputi proses yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Perkembangan melibatkan penambahan atau perubahan kualitatif yang menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan seringkali dikaitkan dengan kemajuan atau peningkatan. Tujuan akhir dari perkembangan adalah mencapai tingkat kesempurnaan atau kualitas yang lebih tinggi.⁷

Secara istilah, perkembangan sosial adalah proses perubahan berkelanjutan dalam perilaku, perasaan, sikap, dan pemahaman seseorang terhadap orang lain, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan norma, aturan, dan tuntutan lingkungan sosial. Perkembangan ini melibatkan proses belajar untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain, serta mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam yang lahir di tengah-tengah pergerakan kebangkitan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20, telah memainkan peran yang tak terbantahkan dalam kemajuan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sejak pendiriannya oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta, Muhammadiyah telah menjadi salah satu kekuatan

⁷ Aplikasi kamus besar bahasa indonesia offline. Di akses 26 April, 01.09 WIB

utama yang membentuk wajah Indonesia modern.

1.6 Kajian Pustaka

Dalam kajian literatur ini, penulis mengumpulkan sejumlah referensi yang membahas mengenai “Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen.” Tinjauan pustaka ini merupakan langkah awal yang penting bagi peneliti dalam mencari referensi seperti artikel, *jurnal*, buku, *skripsi*, dan penelitian sebelumnya yang mempunyai variabel serupa dengan yang kita akan angkat dalam penelitian ini, tanpa mengandung unsur plagiarisme, sehingga penelitian ini bisa dianggap sebagai penelitian yang asli.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perkembangan organisasi di Kabupaten Bireuen, permasalahan organisasi di Kabupaten Bireuen dan harapan terbesar organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen di masa yang akan datang. Kajian ini merupakan kajian yang belum pernah diteliti sebelumnya secara spesifik dari sisi perkembangan, permasalahan, dan harapan mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan penelitian lainnya.

Weli Tridayatna AS, *Sejarah dan Peran Muhamadiyah di dalam pendidikan*. Setelah kembali dari ibadah Haji kedua, KH. Ahmad Dahlan mengalami percepatan (eskalasi) intelektual yang progresif. Karya-karya para intelektual pembaruan Islam memengaruhi eksploitasi intelektual. Di antaranya adalah Al Islam Wan-Nashraniyyah karya Muhammad Abduh, Tafsir Juz'Amma, dan Risalah Tauhid Paradigma penelitian para cendekiawan Muslim yang disebutkan di atas dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok berbeda dari

perspektif pembaruan Islam.⁸

Konstruksi pemikiran ini menekankan betapa pentingnya merekonstruksi paradigma dan metodologi penelitian Islam untuk menjawab masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan dengan menggunakan akal dan ijtihad. Diharapkan langkah ini akan menghentikan kemunduran dan mengarah pada kemajuan peradaban Islam. Banyak faktor berkontribusi pada kemunduran peradaban Islam; salah satunya adalah cara umat Islam menangani perubahan sosial. Pemikiran dan tindakan sosial-keagamaan KH. Ahmad Dahlan dipengaruhi oleh pembentukan gagasan ini, yang kemudian mendorongnya untuk mendirikan Muhammadiyah untuk mendorong pembaruan Islam di Indonesia.

Syah Iskandar, Zuriah, *Harmonisasi Intra Umat beragama di Kabupaten Bireun pasca konflik antar Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama*. Harmonisasi dapat diartikan sebagai sebuah keselarasan, dalam pandangan yang lebih jauh harmonisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah kecocokan, kesesuaian, keseimbangan dan keadilan sehingga memberikan rasa aman serta kedamaian dan kesejahteraan pada seluruh umat manusia.⁹

Dalam konteks umat beragama maka sebuah keharmonisan akan diwujudkan dalam bentuk interaksi antar umat beragama yang dilandasi sikap toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agama. Harmonisasi tidak hanya ditunjukkan pada

⁸ Weli Tridayatna AS, Sejarah dan Peran Muhammadiyah di dalam pendidikan *Jurnal Proceeding Internasional Seminar on Islamic studies*, hlm. 1324.

⁹ Syah Iskandar, Zuriah, "Harmonisasi Intra Umat beragama di Kabupaten Bireun pasca konflik antar Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama", *Jurnal At Tanzir :Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam* 13, no. 21 (2022): 137-148.

individu atau masyarakat yang berbeda Agama, melainkan harus diwujudkan juga dalam masyarakat yang berbeda pandangan dalam pengamalan agama, seperti perbedaan organisasi dakwah atau aliran.

Harmonisasi tidak dapat dipahami tanpa adanya konflik keagamaan. Istilah harmonisasi menjadi penting sebagai sisi lain dari kedamaian yang ingin dicapai pasca terjadinya konflik keagamaan. perbedaan penafsiran dan praktik ritual agama.

Skripsi Hasimida, *Perkembangan Muhammadiyah di Gampoung Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (2009-2017)*. Pengaruh positif yang telah diberikan Muhammadiyah untuk masyarakat Gampoung Kuta Bak Drien, terutama dalam meluruskan amaliah ibadah, yang bertujuan untuk lebih jelas dalam mengelola amal usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Muhammadiyah telah berhasil mengambil hati masyarakat, sehingga masyarakat Gampoung Kuta Bak Drien sangat kuat dalam mempertahankan Muhammadiyah. Oleh karena itu sampai sekarang Muhammadiyah sudah sangat berkembang di Gampoung Kuta Bak Drien.¹⁰

Pengaruh positif di antaranya adalah Mushalla Muhammadiyah Gampoung Kuta Bak Drien. Mushalla yang bersih, shalat yang disiplin dan tepat waktu, membuat orang betah shalat dan berlama-lama di Mushalla. Para jamaah bukan hanya warga Muhammadiyah, tetapi juga warga masyarakat lainnya.

Setelah melihat dari beberapa Skripsi terahulu dan karya ilmiah tentang

¹⁰ Skripsi Hasimida, *Perkembangan Muhammadiyah di Gampoung Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (2009-2017)*, Skripsi Sosiologi Agama, Uin AR-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 46

Muhamadiyah di aceh, belum ada penelitian tentang perkembangan Muhammadiyah di Bireuen. Penelitian yang telah di sebutkan di atas lebih merujuk pada sebuah fenomena sosial. Oleh sebab itu penulis tertarik mengambil judul ini untuk mengkaji lebih lanjut. Penulis melihat belum ada tulisan khusus yang menulis khususnya tentang ***“Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen”***.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.¹¹ Suatu karya ilmiah pada dasarnya merupakan hasil dari penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bersifat *participant observation*, yaitu penulis sendiri menjadi instrument pengumpulan data.¹² Penelitian kualitatif merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan berbaur dengan objek yang diteliti serta menganalisis data-data penelitian yang diperoleh. Metode kualitatif ini mengumpulkan sumber primer dalam hal perkembangan organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen.

b. Lokasi Penelitian

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: CV Alfabeta, 2019), hlm. 2

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.8.

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bireuen. Peneliti memilih lokasi ini, berdasarkan persepsi yang berkembang di masyarakat, masih terdapat anggapan bahwa Muhammadiyah dan Nahdatul ulama memiliki perbedaan pandangan dalam beberapa bidang keagamaan, sehingga terkadang menimbulkan kesan adanya jarak di antara kedua organisasi tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan objek penelitian adalah masyarakat di Kabupaten Bireuen.

c. Sumber Data

Sumber data penelitian berfungsi sebagai subjek dari mana data dikumpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Muhammadiyah, tokoh-tokoh yang berpengaruh, serta masyarakat yang mengetahui perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen. Data sekunder diperoleh dari sumber tertulis, seperti buku, skripsi terdahulu, surat kabar, jurnal, dan sumber dari internet yang berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber lisan sebagai data primer dan sumber tertulis sebagai data sekunder.¹³

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penelitian. Peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi tentang perkembangan organisasi di

¹³ Tim Penyusun, Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Kabupaten Bireuen, permasalahan organisasi di Kabupaten Bireuen dan harapan terbesar organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen di masa yang akan datang Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁴ Untuk mendapatkan data-data yang diperoleh maka peneliti menggunakan tiga langkah, adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Salah satu teknik dalam pengumpulan data adalah observasi. Dalam buku Kristanto, Zainal Arifin mengartikan observasi sebagai suatu proses yang dimulai dari pengamatan dan berlanjut pada pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai peristiwa dalam lingkungan nyata dan buatan.¹⁵

2 Wawancara

Wawancara adalah suatu alat pengumpulan data yang bertujuan untuk menanyakan beberapa pertanyaan secara lisan atau secara tulisan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*Indept Interview*) yaitu wawancara untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran secara lebih lanjut mengenai sikap, pandangan, perilaku, persepsi, orientasi para perilaku terhadap peristiwa atau objek.¹⁶ Wawancara pada penelitian ini adalah teknik untuk dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber melalui komunikasi secara langsung. Wawancara yang

¹⁴Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 139

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan RAD*, (Bandung: Alafabeta, 2015) hlm. 240

peneliti gunakan adalah wawancara yang terstruktur.

Adapun yang akan diwawancarai yaitu Seketaris Muhammadiyah Bireuen, Masyarakat Muhammadiyah Bireuen, Pimpinan Samalanga Bireuen, serta masyarakat di luar Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen.

3 Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mengandung arti barang-barang tertulis atau catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa lembar catatan, transkrip, buku, surat kabar, makalah, skripsi terdahulu, web seperti jurnal, artikel dan sebagainya, sehingga memperoleh data yang benar.

e. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷ Analisis data dilakukan setelah semua data primer dan sekunder terpenuhi, yang kemudian diolah kembali oleh penulis. Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸ Yaitu tentang Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen.

1.8 Sistematika Penulisan

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm, 334.

¹⁸ Conny R. Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm, 122.

Untuk Mempermudah gambaran dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal penelitian yang membahas latar belakang masalah sebagai dasar dilakukannya penelitian. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Konseptual, membahas landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari konsep organisasi kemasyarakatan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, perkembangan organisasi Muhammadiyah, serta indikator perkembangan organisasi yang menjadi dasar dalam menganalisis perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, memberikan gambaran mengenai lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Bireuen. Pembahasan dalam bab ini meliputi gambaran umum Kabupaten Bireuen serta kondisi sosial, keagamaan, dan pendidikan masyarakat Kabupaten Bireuen sebagai konteks lingkungan tempat organisasi Muhammadiyah berkembang.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, merupakan bagian utama penelitian yang menyajikan hasil penelitian. Bab ini membahas tentang perkembangan organisasi di Kabupaten Bireuen, permasalahan organisasi di Kabupaten Bireuen dan harapan terbesar organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen di masa yang akan datang.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian, sedangkan saran berisi rekomendasi yang dapat

diberikan kepada pihak terkait maupun bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Konsep Organisasi Kemasyarakatan Islam

Organisasi kemasyarakatan Islam merupakan wadah yang dibentuk oleh masyarakat untuk menghimpun individu-individu yang memiliki tujuan bersama dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, maupun dakwah berdasarkan ajaran Islam. Keberadaan organisasi ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena berfungsi sebagai sarana pembinaan umat, pengembangan sumber daya manusia, serta media partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks Indonesia, organisasi kemasyarakatan Islam berkembang dengan karakteristik yang beragam sesuai dengan latar belakang sejarah, budaya, dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.¹⁹

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan dibentuk oleh warga negara secara sukarela berdasarkan kesamaan tujuan dan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.²⁰

Dalam perspektif Islam, organisasi kemasyarakatan dipahami sebagai

¹⁹ Mamat Rahmat, "Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam Dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam Di Indonesia," *Tsamratul Fikri* 17, no. 1 (2023): 45–46.

²⁰ *Ibid*, hlm. 40

sarana untuk mewujudkan kerja sama dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi kemasyarakatan Islam tidak hanya berorientasi pada kegiatan keagamaan, melainkan mengembangkan berbagai aktivitas sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

2.1.1 Organisasi Islam di Indonesia

Perkembangan organisasi Islam di Indonesia memiliki hubungan erat dengan dinamika kehidupan masyarakat pada masa kolonial hingga setelah kemerdekaan. Organisasi-organisasi Islam lahir sebagai respons terhadap kebutuhan pembinaan umat, peningkatan pendidikan, serta perjuangan memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Pada awal abad ke-20 muncul berbagai organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Kehadiran organisasi tersebut memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, pelayanan sosial, serta perjuangan kebangsaan.²²

Keberagaman organisasi Islam di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam memahami dan mengembangkan ajaran Islam tanpa menghilangkan tujuan utama untuk memajukan umat. Setiap organisasi memiliki ciri khas dalam metode dakwah, sistem pendidikan, maupun pengelolaan

²¹ Haidar Adam, "Kedudukan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Siyasah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 59–62.

²² M Fadli, "Pertumbuhan Dan Perkembangan Organisasi- Organisasi Islam: Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Dan Jami'atul Washliyah," *Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Keagamaan* 5, no. 3 (2021): 258–60.

kelembagaan. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang menekankan pembaruan (*tajdid*), pemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, serta pengembangan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Perbedaan karakter antarlembaga tersebut menjadi bagian dari kekayaan kehidupan organisasi Islam di Indonesia.²³

2.1.2 Fungsi dan Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam

Organisasi kemasyarakatan Islam memiliki fungsi sebagai media pembinaan umat melalui kegiatan dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan organisasi ini membantu masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kegiatan sosial, serta pembinaan keagamaan yang berkesinambungan. Fungsi tersebut diwujudkan melalui pembentukan lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, masjid, majelis taklim, dan berbagai kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁴

Peran organisasi kemasyarakatan Islam juga terlihat dalam kehidupan sosial dan pembangunan bangsa. Organisasi Islam menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, menjaga kerukunan umat beragama, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Di samping itu, organisasi Islam berperan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, toleransi, kepedulian sosial, dan penguatan moral berdasarkan ajaran

²³ Ahmad Aziz Mubaroq, Nasrullah Yufi Mohammad, and Hilda Ainissyifa, "Implementasi Sikap Moderasi Dalam Organisasi Islam Di Indonesia," *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 1 (2026): 156.

²⁴ Ahmad Suhendra, "Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, no. 1 (2012): 47–48.

Islam. Peran tersebut menjadikan organisasi kemasyarakatan Islam sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan kehidupan beragama dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.²⁵

2.2 Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam

Muhammadiyah lahir sebagai gerakan Islam yang berorientasi pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan *tajdid* (pembaruan) dengan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kehadiran Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh kondisi kehidupan umat Islam pada masa itu yang masih dipengaruhi praktik-praktik keagamaan yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam serta masih rendahnya kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangannya kemudian menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang berkontribusi besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.²⁶

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Berdirinya organisasi ini dipengaruhi oleh keinginan untuk memperbaiki pemahaman dan praktik keagamaan umat Islam agar kembali berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. K.H. Ahmad Dahlan memandang bahwa umat Islam memerlukan pembaruan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan kehidupan sosial agar mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa

²⁵ Rahmat, "Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam Dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam Di Indonesia."

²⁶ Mar'ati Zarro, Yunani, and Aulia Novemy Dhita, "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Dan Pendidikan," *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2020): 61–66.

meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. Pendirian Muhammadiyah kemudian memperoleh pengakuan pemerintah kolonial Belanda melalui Besluit (Surat Keputusan) tanggal 22 Agustus 1914.²⁷

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah mengembangkan berbagai kegiatan yang berfokus pada pendidikan, dakwah, pelayanan kesehatan, dan kegiatan sosial. Sekolah-sekolah modern mulai didirikan dengan memadukan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum. Langkah tersebut menjadi pembeda dibandingkan sistem pendidikan tradisional pada masa itu. Perkembangan Muhammadiyah berlangsung cukup pesat hingga menjangkau berbagai daerah di Indonesia, termasuk Aceh, sehingga organisasi ini menjadi salah satu kekuatan penting dalam perkembangan Islam modern di Indonesia.²⁸

2.2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Muhammadiyah

Muhammadiyah memiliki visi sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Visi tersebut menjadi arah bagi seluruh kegiatan organisasi dalam bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pelayanan sosial. Tujuan Muhammadiyah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan tersebut dilaksanakan melalui berbagai misi, antara lain menyelenggarakan dakwah Islam, meningkatkan kualitas

²⁷Muhammadiyah, “Sejarah Singkat Muhammadiyah”, <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>, diakses tanggal 14 Juli 2026.

²⁸ Isma Asmaria Purba and Ponirin, “Perkembangan Amal Usaha Organisasi Muhammadiyah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan,” *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah* (JASIKA) 1, no. 2 (2013): 101–111.

pendidikan, mengembangkan pelayanan kesehatan, memberdayakan masyarakat, membina kehidupan keagamaan, serta mengembangkan amal usaha sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat. Seluruh aktivitas Muhammadiyah diarahkan untuk memberikan manfaat yang luas bagi umat dan bangsa.²⁹

2.2.2 Prinsip Gerakan *Tajdid* Muhammadiyah

Tajdid merupakan salah satu identitas utama Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Secara umum, *tajdid* berarti pembaruan atau pemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Muhammadiyah memaknai *tajdid* sebagai upaya mengembalikan praktik keagamaan kepada sumber ajaran Islam yang autentik sekaligus melakukan pembaruan dalam bidang muamalah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Pemahaman tersebut menjadikan Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pelaksanaan *tajdid* diwujudkan melalui pembaruan metode pendidikan, pengembangan sistem dakwah, peningkatan kualitas pelayanan sosial, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat.³⁰

2.3 Perkembangan Organisasi Muhammadiyah

Perkembangan organisasi merupakan proses perubahan yang menunjukkan adanya kemajuan suatu organisasi dalam menjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari kemampuan organisasi memperluas jangkauan kegiatan, meningkatkan kualitas pelayanan,

²⁹ *Anggaran Dasar Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2023).

³⁰ Richa Suciningtyas et al., "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Berkemajuan," *PENA: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2025): 1–9.

memperkuat kelembagaan, serta menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dalam organisasi kemasyarakatan Islam, perkembangan tidak hanya diukur dari pertambahan jumlah anggota, melainkan juga dari kemampuan organisasi menjalankan misi dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.³¹

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak didirikan pada tahun 1912. Perkembangan tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah cabang dan ranting, meningkatnya amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta semakin luasnya peran Muhammadiyah dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan organisasi mempertahankan eksistensinya selama lebih dari satu abad menunjukkan adanya sistem organisasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan.³²

Muhammadiyah mulai berkembang di Aceh pada dekade 1920-an. Kehadiran organisasi ini diawali oleh S. Djaja Suekarta, mantan Sekretaris Muhammadiyah Cabang Batavia, yang pindah ke Kutaraja atau yang sekarang Banda Aceh, pada tahun 1923. Pembentukan Cabang Muhammadiyah di Kutaraja baru dapat direalisasikan pada tahun 1927 setelah memperoleh dukungan dari Pengurus Pusat Muhammadiyah melalui A.R. Sutan Mansur. Perkembangan Muhammadiyah di Aceh berlangsung secara bertahap melalui kegiatan dakwah,

³¹ Sahadi, Neti Sunarti, and Endah Puspitasari, "PENGEMBANGAN ORGANISASI (Tinjauan Umum Pada Semua Organisasi)," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 399–401.

³² Ferihana Ferihana, "Perkembangan Amal Usaha Muhammadiyah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan," *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyahan (JASIKA)* 2, no. 2 (2022): 156–160.

pendidikan, pengajian, dan pembentukan amal usaha di berbagai daerah.³³

Perjalanan Muhammadiyah di Aceh tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Perbedaan pemahaman keagamaan dengan sebagian kelompok masyarakat sering menimbulkan dinamika dalam proses penyebaran dakwah Muhammadiyah. Kondisi tersebut tidak menghentikan perkembangan organisasi karena Muhammadiyah terus memperluas jaringan cabang, ranting, sekolah, masjid, serta kegiatan sosial di berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Keberadaan Muhammadiyah kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan organisasi Islam modern di Provinsi Aceh.³⁴

2.4 Indikator Perkembangan Organisasi

Perkembangan suatu organisasi dapat dianalisis melalui sejumlah indikator yang menunjukkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi dan mencapai tujuan. Dalam kajian organisasi, indikator perkembangan tidak hanya mencakup pertumbuhan jumlah anggota, melainkan juga kemampuan organisasi mengelola sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga keberlangsungan kegiatan. Penelitian ini menggunakan tiga indikator utama, yaitu kapasitas sumber daya fisik, kapasitas proses operasional, dan kapasitas sumber daya manusia.³⁵

1. Kapasitas Sumber Daya Fisik

³³ Sri Waryanti, *Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Aceh*. (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2005) hlm. 7.

³⁴ Arifin Zain, Maimun, and Maimun Fuadi, "Internalisasi Nilai-Nilai Modernitas Dalam Gerakan Dakwah Organisasi Muhammadiyah Di Aceh," *Al-Idarah* 1, no. 1 (2017): 20–23.

³⁵ H. Luthfiah Trini et al., "Peran Organisasi Organisasi Kemasyarakatan Islam Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 98–99.

Kapasitas sumber daya fisik mengacu pada kemampuan organisasi dalam menyediakan dan mengelola berbagai fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. Sumber daya fisik meliputi kantor organisasi, masjid, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, klinik kesehatan, panti asuhan, balai pertemuan, serta berbagai sarana lain yang dimanfaatkan untuk menjalankan aktivitas organisasi. Ketersediaan fasilitas tersebut menunjukkan tingkat kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.³⁶

Bagi Muhammadiyah, sumber daya fisik memiliki peran penting karena menjadi media pelaksanaan dakwah dan amal usaha. Semakin berkembang jumlah dan kualitas fasilitas yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan organisasi dalam menjalankan program pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan. Perkembangan sarana fisik tersebut dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai kemajuan Muhammadiyah di suatu daerah, termasuk di Kabupaten Bireuen.

2. Kapasitas Proses Operasional

Kapasitas proses operasional merupakan kemampuan organisasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, serta mengevaluasi seluruh kegiatan organisasi secara efektif. Proses operasional mencakup mekanisme pengambilan keputusan, pelaksanaan program kerja, koordinasi antarpengurus, administrasi organisasi, serta sistem pengelolaan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Organisasi yang memiliki proses operasional yang baik akan lebih mudah mempertahankan keberlangsungan program dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.³⁷

³⁶ *Ibid*, hlm. 99.

³⁷ *Ibid*, hlm. 100.

Dalam Muhammadiyah, proses operasional dilaksanakan melalui struktur organisasi yang tersusun mulai dari tingkat pusat hingga ranting. Setiap tingkatan memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Pelaksanaan musyawarah, rapat organisasi, program dakwah, pembinaan kader, serta pengelolaan amal usaha menjadi bagian dari proses operasional yang menunjukkan tingkat efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsinya.

3. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui proses kaderisasi, pendidikan, pelatihan, pembinaan kepemimpinan, serta peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting karena keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu yang mengelolanya.³⁸

Muhammadiyah menempatkan kaderisasi sebagai salah satu aspek utama dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Pembinaan kader dilaksanakan melalui organisasi otonom, lembaga pendidikan, pengajian, serta berbagai kegiatan pelatihan kepemimpinan. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen terhadap tujuan organisasi menjadi modal penting dalam mempertahankan eksistensi serta mendorong perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen.

³⁸ *Ibid.* hlm. 101.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000. Sebelum pemekaran tersebut, wilayah Kabupaten Bireuen merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Utara. Pembentukan daerah otonom baru ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah pantai timur Aceh.³⁹

Secara geografis, Kabupaten Bireuen terletak pada koordinat 4°54'–5°21' Lintang Utara dan 96°20'–97°21' Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.796,31 km² atau setara dengan 179.631 hektare, yang mencakup sekitar 3,13 persen dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Aceh. Posisi geografis tersebut menjadikan Kabupaten Bireuen sebagai salah satu daerah yang memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan di kawasan timur Aceh.

Secara administratif, Kabupaten Bireuen berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Utara di sebelah timur, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah di sebelah selatan, serta Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya di sebelah barat. Letak yang strategis tersebut memberikan

³⁹ Pemerintah Kabupaten Bireun, “Demografi”, <https://www.bireuenkab.go.id/halaman/demografi>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2026.

keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Bireuen karena berada pada jalur transportasi utama yang menghubungkan berbagai wilayah di Provinsi Aceh. Kondisi ini turut mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta pengembangan berbagai sektor ekonomi daerah.

Wilayah administrasi Kabupaten Bireuen saat ini terbagi ke dalam 17 kecamatan, yaitu Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Makmur, Gandapura, dan Kuta Blang. Pembagian wilayah tersebut mencerminkan luasnya cakupan pelayanan pemerintahan sekaligus menunjukkan keragaman karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat yang tersebar di berbagai kecamatan.

Berdasarkan luas wilayahnya, Kecamatan Peudada merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 31.283,90 hektare atau 17,42 persen dari total wilayah Kabupaten Bireuen. Posisi berikutnya ditempati oleh Kecamatan Juli dengan luas sekitar 23.118,35 hektare atau 12,87 persen dari total luas wilayah kabupaten. Sementara itu, kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Kuala yang masing-masing memiliki luas sekitar 1.690,87 hektare dan 1.724,56 hektare. Perbedaan luas wilayah tersebut berpengaruh terhadap pola pemanfaatan ruang, persebaran penduduk, serta pengembangan infrastruktur pada masing-masing kecamatan.

Keberadaan Kabupaten Bireuen pada jalur nasional lintas Sumatera menjadikan daerah ini memiliki nilai strategis dalam pengembangan ekonomi regional. Kabupaten Bireuen berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di

kawasan pantai timur Aceh karena didukung oleh aksesibilitas yang baik dan hubungan yang erat dengan daerah-daerah sekitarnya, seperti Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Aceh Utara. Posisi tersebut membuka peluang kerja sama antarwilayah dalam bidang perdagangan, pariwisata, transportasi, serta berbagai sektor jasa lainnya.

Dari aspek demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 mencapai 443.874 jiwa yang terdiri atas 219.039 jiwa laki-laki dan 224.835 jiwa perempuan. Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk sekitar 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio jenis kelamin sebesar 97,4 menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 97 penduduk laki-laki. Kondisi demografis ini mencerminkan komposisi penduduk yang relatif seimbang dan berpotensi mendukung pembangunan daerah melalui ketersediaan sumber daya manusia yang cukup besar.

Kepadatan penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 tercatat sebesar 247 jiwa per kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kecamatan Kota Juang sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi memiliki tingkat kepadatan tertinggi, yaitu sekitar 2.838 jiwa per kilometer persegi. Sebaliknya, Kecamatan Pandrah merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah, yakni sekitar 79 jiwa per kilometer persegi. Variasi kepadatan tersebut menggambarkan perbedaan tingkat perkembangan wilayah, konsentrasi aktivitas ekonomi, serta persebaran penduduk di Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan kondisi geografis, administratif, dan demografis tersebut,

Kabupaten Bireuen memiliki karakteristik wilayah yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan penelitian. Potensi sumber daya alam, letak yang strategis, jumlah penduduk yang besar, serta dinamika sosial masyarakat menjadikan kabupaten ini relevan sebagai lokasi penelitian, khususnya dalam mengkaji perkembangan organisasi kemasyarakatan Islam dan peranannya dalam kehidupan sosial masyarakat.

3.2 Kondisi Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki kehidupan sosial masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal dan ajaran Islam. Interaksi sosial antarmasyarakat dibangun atas dasar semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan sikap saling membantu yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, seperti musyawarah, gotong royong, kegiatan adat, serta pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Karakter masyarakat Kabupaten Bireuen tidak dapat dipisahkan dari adat Aceh yang berpijak pada falsafah bahwa adat dan syariat merupakan dua unsur yang saling melengkapi. Nilai-nilai tersebut membentuk pola kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi etika, sopan santun, penghormatan kepada tokoh agama dan tokoh adat, serta kepedulian terhadap kehidupan sosial di lingkungan masing-masing. Kondisi tersebut menciptakan ikatan sosial yang relatif kuat sehingga berbagai aktivitas kemasyarakatan masih dilaksanakan secara kolektif.

Hubungan sosial masyarakat juga ditandai oleh tingginya partisipasi dalam

berbagai kegiatan sosial. Tradisi saling membantu pada saat penyelenggaraan kenduri, pembangunan fasilitas umum, kegiatan kebersihan lingkungan, maupun ketika terjadi musibah masih menjadi budaya yang terus dipertahankan. Pola kehidupan semacam ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial masih menjadi salah satu karakter utama masyarakat Kabupaten Bireuen.

Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya berasal dari etnis Aceh, penggunaan Bahasa Aceh masih mendominasi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi formal. Keberadaan bahasa daerah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus dipertahankan oleh masyarakat di tengah perkembangan zaman.

Dari aspek keagamaan, masyarakat Kabupaten Bireuen memiliki karakter religius yang sangat kuat. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam sehingga ajaran Islam menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan ibadah, kegiatan pengajian, peringatan hari-hari besar Islam, serta berbagai aktivitas dakwah berlangsung secara rutin di masjid, meunasah, dan lembaga pendidikan keagamaan yang tersebar di berbagai kecamatan.

Pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh turut memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Bireuen. Nilai-nilai keislaman tidak hanya tercermin dalam aktivitas ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan pembentukan karakter masyarakat. Kondisi tersebut mendorong tumbuhnya berbagai organisasi kemasyarakatan Islam yang berperan dalam bidang dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan ulama, pimpinan dayah, serta tokoh agama memiliki posisi yang penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bireuen. Tokoh-tokoh tersebut menjadi rujukan dalam menyelesaikan persoalan keagamaan maupun persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Peran tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bireuen masih memberikan ruang yang besar terhadap kepemimpinan keagamaan sebagai bagian dari sistem sosial yang berkembang.

Pada bidang pendidikan, Kabupaten Bireuen menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan akses pendidikan melalui penyediaan satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah yang tersebar di berbagai kecamatan. Selain sekolah umum, terdapat pula madrasah serta lembaga pendidikan keagamaan yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Bireuen juga didukung oleh keberadaan berbagai lembaga pendidikan Islam, khususnya dayah yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pemahaman keagamaan masyarakat. Lembaga pendidikan tersebut menjadi bagian dari sistem pendidikan yang telah lama berkembang di Aceh dan tetap memperoleh kepercayaan masyarakat hingga saat ini.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, capaian pendidikan masyarakat terus mengalami peningkatan yang tercermin dari meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas telah mencapai sekitar

9,59 tahun atau setara dengan penyelesaian pendidikan hingga tingkat SMP dan sebagian memasuki jenjang SMA. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun.⁴⁰

Peningkatan kualitas pendidikan memberikan dampak terhadap semakin terbukanya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut sekaligus mendorong berkembangnya berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi Islam, dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembinaan generasi muda, dan pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, melainkan juga sebagai media pembentukan karakter, moral, dan kepemimpinan masyarakat.

Kondisi sosial, keagamaan, dan pendidikan yang berkembang di Kabupaten Bireuen menjadi landasan yang mendukung pertumbuhan organisasi-organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah. Karakter masyarakat yang religius, budaya gotong royong yang masih terpelihara, serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan memberikan ruang bagi Muhammadiyah untuk mengembangkan aktivitas dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kondisi sosial-keagamaan Kabupaten Bireuen menjadi salah satu faktor penting yang mendukung perkembangan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang bergerak dalam bidang dakwah dan tajdid.

⁴⁰ Maimun, "Kabupaten Bireuen Dalam Angka 2025 Bireuen Regency in Figures 2025", <https://bireuenkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/48455492d90b94b51c8a8459/bireuen-regency-in-figures-2025.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2026.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen

Perkembangan organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen merupakan suatu proses yang berlangsung secara bertahap seiring dengan penyebaran gerakan pembaruan Islam di Aceh. Kehadiran Muhammadiyah di daerah ini tidak hanya ditandai oleh terbentuknya kepengurusan organisasi, namun juga melalui berkembangnya aktivitas dakwah, pendidikan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam berkemajuan. Dinamika perkembangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun kondisi sosial masyarakat Bireuen yang memiliki karakteristik keagamaan yang kuat.⁴¹

Pembahasan mengenai perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen dalam penelitian ini mengkaji tentang perkembangan organisasi di Kabupaten Bireuen, permasalahan organisasi di Kabupaten Bireuen dan harapan terbesar organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen di masa yang akan datang.

4.1.1 Awal Perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen

Perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen berlangsung secara bertahap seiring meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap gagasan

⁴¹ Syah Iskandar and Zuriah Amnar, "Harmonisasi Intra Umat Beragama Di Kabupaten Bireuen Pasca Konflik Antara Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama," *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* 13, no. 2 (2022): 137–140.

pembaruan Islam. Penyebaran organisasi tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan melalui proses dakwah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, ulama, serta masyarakat yang pernah memperoleh pendidikan di lingkungan Muhammadiyah di daerah lain. Melalui interaksi tersebut, nilai-nilai yang diperjuangkan Muhammadiyah mulai dikenal dan diterapkan oleh sebagian masyarakat Bireuen.

Tabel 4.1 Persebaran Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen

No	Cabang Muhammadiyah	Gambaran Perkembangan
1	Gandapura (Sofyan Yusuf)	Cabang yang berkembang pesat, aktif dalam kegiatan organisasi dan menjadi lokasi berdirinya panti asuhan Muhammadiyah pertama di Kabupaten Bireuen.
2	Kuta Blang (Tgk. Syekh Nasir Hasan)	Mengalami perkembangan organisasi, meskipun rencana pembangunan masjid belum dapat direalisasikan.
3	Peusangan (Athaillah A. Latief)	Memiliki perkembangan yang cukup baik dengan meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap Muhammadiyah.
4	Kota Juang (Zakaria)	Menjadi salah satu pusat aktivitas Muhammadiyah karena berada di ibu kota kabupaten.
5	Kuala (Abu Bakar)	Aktivitas organisasi relatif terbatas, tetapi kegiatan pengajian masih berlangsung secara rutin.
6	Juli (Safrizal)	Mengalami perkembangan setelah berhasil menyelesaikan persoalan pembangunan Masjid At-Taqwa Muhammadiyah.
7	Samalanga (M. Yahya Arsyad)	Tetap berkembang meskipun menghadapi tantangan berupa perbedaan pemahaman keagamaan di tengah masyarakat.

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan pengurus Muhammadiyah Kabupaten Bireuen dan data penelitian Nazila (2022).

Keberadaan cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai kecamatan menunjukkan bahwa proses perkembangan organisasi di Kabupaten Bireuen berlangsung secara bertahap dan menjangkau wilayah yang cukup luas. Setiap cabang memiliki dinamika yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial, kepemimpinan lokal, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap gerakan Muhammadiyah. Perbedaan tersebut menyebabkan perkembangan organisasi tidak berlangsung secara seragam, namun secara keseluruhan memperlihatkan adanya upaya yang berkelanjutan dalam memperluas dakwah, meningkatkan pelayanan sosial, serta memperkuat eksistensi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen.⁴²

Pada masa awal perkembangannya, aktivitas Muhammadiyah lebih banyak berorientasi pada pembinaan keagamaan. Pengajian, pendidikan agama, dan penyampaian pemahaman mengenai pelaksanaan ibadah berdasarkan dalil menjadi kegiatan utama yang dilakukan. Pendekatan tersebut bertujuan membangun pemahaman keagamaan masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai persaudaraan sesama umat Islam.

Perjalanan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Perbedaan pandangan mengenai beberapa praktik keagamaan menyebabkan organisasi ini memerlukan waktu untuk memperoleh penerimaan yang lebih luas. Kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika perkembangan organisasi Islam yang juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi dari adanya keragaman cara

⁴² Intan Nazila, "Dinamika Perkembangan Muhammadiyah Di Bireuen (2000-2019)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

memahami ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.⁴³

Wilayah Samalanga menjadi salah satu daerah yang menunjukkan dinamika perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen. Daerah ini dikenal sebagai kawasan yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat dengan keberadaan banyak dayah dan ulama. Situasi tersebut menjadikan proses pengembangan Muhammadiyah memerlukan pendekatan dakwah yang lebih persuasif sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai bagian dari organisasi Islam yang turut berkontribusi terhadap pembinaan umat.⁴⁴

Perkembangan Muhammadiyah di Bireuen tidak hanya ditandai oleh bertambahnya anggota organisasi, tetapi juga mulai terbentuknya struktur kepemimpinan yang mampu menjalankan fungsi organisasi secara lebih terarah. Pembentukan kepengurusan menjadi langkah penting dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial sehingga pelaksanaan program organisasi dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Keberadaan amal usaha Muhammadiyah secara bertahap memperkuat eksistensi organisasi di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan pendidikan, pengajian, dan pelayanan sosial menjadi sarana untuk memperkenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat secara lebih luas. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan organisasi diukur dari kontribusi nyata terhadap kebutuhan masyarakat.⁴⁵

⁴³ Hasil Wawancara dengan YA, Muhammadiyah Cabang Samalanga, pada tanggal 04 Juli 2026.

⁴⁴ Hasil Observasi pada tanggal 04 Juli 2026.

⁴⁵ Muhammad Yamin, "Strategi Penerapan Manajemen Kurban Warga Muhammadiyah Aceh," *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh* 10, no. 2 (2020): 84–90.

Perkembangan tersebut semakin memperlihatkan bahwa Muhammadiyah mampu mempertahankan eksistensinya meskipun menghadapi berbagai tantangan. Konsistensi dalam menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar menjadi faktor yang memperkuat keberadaan organisasi di Kabupaten Bireuen. Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang diusung Muhammadiyah menjadi landasan dalam setiap aktivitas organisasi sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat secara bertahap.

4.1.2 Perkembangan Kepengurusan Organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen

Perkembangan organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari peran kepengurusan yang menjalankan roda organisasi. Kepengurusan berfungsi sebagai unsur penggerak yang merancang program kerja, mengoordinasikan kegiatan, serta menjaga kesinambungan gerakan Muhammadiyah di tingkat daerah. Struktur organisasi yang terbentuk menjadi dasar bagi pelaksanaan dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial secara terorganisasi.⁴⁶

Pembentukan kepengurusan dilakukan melalui mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan Muhammadiyah. Pergantian kepemimpinan dilaksanakan secara musyawarah sehingga menghasilkan kepengurusan yang memiliki legitimasi organisasi. Sistem tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah menerapkan tata kelola organisasi yang mengedepankan prinsip demokrasi, musyawarah, dan tanggung jawab bersama.⁴⁷

⁴⁶ Andri Moewashi Idharoel Haq and Sistiana Windyariani, "Program Penguatan Cabang Dan Ranting Muhammadiyah Di Sukabumi," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2015): 45–49.

⁴⁷ Diki Trianto, "Kepengurusan PP Muhammadiyah 2022-2027 Terbentuk, Ini

Seiring berjalannya waktu, kepengurusan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen mengalami perkembangan baik dari sisi struktur maupun pembagian tugas. Setiap pengurus memiliki bidang kerja yang berbeda sesuai kebutuhan organisasi sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif. Pembagian tersebut mencakup bidang dakwah, pendidikan, kaderisasi, organisasi, ekonomi, serta hubungan dengan masyarakat.

Perkembangan kepengurusan juga terlihat dari meningkatnya koordinasi antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan pimpinan cabang maupun ranting. Hubungan yang terbangun secara berjenjang memudahkan penyampaian kebijakan organisasi sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan. Koordinasi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keseragaman arah gerakan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen.

Pelaksanaan program organisasi bergantung pada kemampuan kepengurusan dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Pengurus tidak hanya bertanggung jawab menjalankan administrasi organisasi, tetapi juga membangun komunikasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga lainnya. Kemampuan tersebut menjadi salah satu indikator berkembangnya kualitas organisasi dari waktu ke waktu.

Peran pengurus semakin penting ketika organisasi menghadapi berbagai tantangan. Kepemimpinan yang mampu membangun komunikasi, menyelesaikan persoalan secara musyawarah, serta menjaga persatuan anggota menjadi modal utama dalam mempertahankan eksistensi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen.

Susunannya”, <https://rmol.id/politik/read/2022/12/16/557323/kepengurusan-pp-muhammadiyah-2022-2027-terbentuk-ini-susunannya>, diakses pada tanggal 21 Juli 2026.

Keberhasilan organisasi dalam melewati berbagai dinamika menunjukkan bahwa kepengurusan memiliki fungsi strategis dalam menjaga kesinambungan gerakan Muhammadiyah.

Regenerasi kepengurusan menjadi bagian penting dalam proses perkembangan organisasi.⁴⁸ Keterlibatan kader muda memberikan peluang bagi Muhammadiyah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar organisasi. Regenerasi tersebut diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Muhammadiyah.

Berdasarkan uraian di atas, perkembangan kepengurusan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen menunjukkan adanya proses kelembagaan yang semakin matang. Kepengurusan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi organisasi, namun juga sebagai motor penggerak dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan Muhammadiyah dalam menjalankan perannya sebagai organisasi Islam yang berorientasi pada pembaruan dan kemajuan umat.

4.1.3 Kebijakan Organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen

Kebijakan organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan tujuan dan kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah secara berjenjang. Secara normatif, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid yang

⁴⁸ Ayu Aulia Adista et al., "Implementasi Intervensi Komunitas: Sosialisasi Kepemimpinan Untuk Regenerasi Pengurus Karang Taruna Di Desa Wringinanom," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 4, no. 1 (2024): 53–60.

bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Identitas tersebut menjadi dasar bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pimpinan Muhammadiyah, termasuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu, arah kebijakan organisasi pada tingkat daerah tidak dapat dipisahkan dari tujuan dan karakter dasar Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang menjalankan dakwah dan pembaruan.

Landasan utama kebijakan Muhammadiyah terdapat pada Pasal 6 Anggaran Dasar yang menetapkan bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ketentuan tersebut memberikan arah umum bagi penyelenggaraan organisasi pada seluruh tingkatan. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen dalam menjalankan organisasi memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan tujuan tersebut ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi organisasi serta kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Bireuen. Dengan demikian, kebijakan daerah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk mengimplementasikan tujuan Persyarikatan pada tingkat lokal.⁴⁹

Pelaksanaan tujuan tersebut secara organisatoris dilakukan melalui dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan. Pasal 7 Anggaran Dasar menyatakan bahwa usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebijakan organisasi tidak hanya berbentuk keputusan

⁴⁹ Anggaran Dasar Muhammadiyah, <https://muhammadiyah.or.id/anggaran-dasar/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2026.

administratif, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kegiatan yang memberikan manfaat bagi perkembangan persyarikatan dan kehidupan masyarakat. Pimpinan Muhammadiyah pada setiap tingkatan menjadi pihak yang menentukan kebijakan sekaligus bertanggung jawab atas amal usaha, program, dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pada tingkat Kabupaten Bireuen, pelaksanaan kebijakan tersebut berada pada kewenangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar menegaskan bahwa Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah di daerahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Ketentuan ini menunjukkan adanya hubungan hierarkis antara Pimpinan Daerah dengan Pimpinan Wilayah serta Pimpinan Pusat. Kebijakan yang dijalankan oleh Muhammadiyah Kabupaten Bireuen karena itu memiliki dua dimensi, yaitu melaksanakan arah kebijakan organisasi pada tingkat yang lebih tinggi dan merumuskan pelaksanaan program yang sesuai dengan karakteristik daerahnya.

Kebijakan organisasi juga berkaitan dengan penguatan struktur Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen. Pasal 9 Anggaran Dasar mengatur bahwa susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah, dan Pusat. Pimpinan Daerah merupakan kesatuan Cabang dalam satu kabupaten atau kota. Struktur tersebut memberikan kerangka bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen untuk mengoordinasikan keberadaan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting sebagai bagian dari satu kesatuan organisasi. Penguatan struktur menjadi penting karena keberadaan organisasi pada tingkat cabang dan ranting merupakan sarana untuk memperluas pelaksanaan

program serta mendekatkan aktivitas Muhammadiyah dengan anggota dan masyarakat.

Penguatan struktur tersebut juga memiliki landasan kewenangan yang jelas. Pasal 10 Anggaran Dasar menetapkan bahwa penetapan wilayah dan daerah dilakukan oleh Pimpinan Pusat, cabang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah, sedangkan ranting ditetapkan oleh Pimpinan Daerah. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa Pimpinan Daerah memiliki posisi strategis dalam pengembangan struktur organisasi pada tingkat ranting. Dalam konteks Kabupaten Bireuen, kewenangan tersebut dapat menjadi bagian dari kebijakan pengembangan organisasi melalui perluasan dan penguatan basis persyarikatan pada tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Kebijakan organisasi Muhammadiyah juga dilaksanakan melalui unsur pembantu pimpinan. Pasal 20 Anggaran Dasar menetapkan bahwa unsur pembantu pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga. Majelis menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah, sedangkan Lembaga menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. Keberadaan kedua unsur tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan organisasi tidak hanya bertumpu pada pimpinan inti, melainkan didukung oleh perangkat organisasi yang memiliki fungsi sesuai bidang tugasnya. Pada tingkat Kabupaten Bireuen, keberadaan unsur pembantu pimpinan dapat menjadi instrumen untuk mengoperasionalkan kebijakan sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Selain Majelis dan Lembaga, pelaksanaan kebijakan Muhammadiyah juga berkaitan dengan keberadaan organisasi otonom. Pasal 21 Anggaran Dasar

menjelaskan bahwa organisasi otonom merupakan satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri dengan bimbingan dan pembinaan Pimpinan Muhammadiyah. Kedudukan tersebut memperlihatkan adanya pola pembinaan dan koordinasi antara Muhammadiyah dengan organisasi otonom. Dalam konteks kebijakan daerah, hubungan tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat keberlangsungan gerakan melalui pembinaan organisasi, pengembangan kegiatan, serta keterlibatan unsur-unsur organisasi otonom dalam pelaksanaan program Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen.

Perumusan kebijakan Muhammadiyah di tingkat daerah juga memiliki mekanisme permusyawaratan. Pasal 26 Anggaran Dasar menetapkan bahwa Musyawarah Daerah merupakan permusyawaratan Muhammadiyah di tingkat daerah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah. Keanggotaan Musyawarah Daerah melibatkan Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting, serta unsur organisasi otonom tingkat daerah. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan organisasi memiliki mekanisme partisipatif karena melibatkan unsur-unsur organisasi yang berada pada berbagai tingkatan.

Proses pengambilan keputusan dalam Muhammadiyah pada dasarnya mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pasal 31 Anggaran Dasar menyatakan bahwa keputusan musyawarah diusahakan melalui mufakat dan apabila mufakat tidak tercapai, keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak. Mekanisme tersebut memberikan dasar bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen dalam merumuskan

kebijakan secara kolektif. Kebijakan organisasi dengan demikian memiliki proses pengambilan keputusan yang tidak hanya berorientasi pada kewenangan pimpinan, melainkan mempertimbangkan hasil permusyawaratan dalam struktur organisasi.

Kebijakan organisasi kemudian diterjemahkan ke dalam keputusan dan program melalui rapat pimpinan serta rapat kerja. Pasal 32 mengatur bahwa Rapat Pimpinan pada tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah membicarakan masalah kebijakan organisasi. Sementara itu, Pasal 33 menjelaskan bahwa Rapat Kerja digunakan untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan amal usaha, program, dan kegiatan organisasi. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pemisahan antara forum pembahasan kebijakan dan forum perencanaan pelaksanaan program. Bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen, mekanisme tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun, mengoordinasikan, dan mengevaluasi program organisasi secara terarah.

Aspek penting lainnya ialah keberlakuan keputusan organisasi melalui mekanisme tanfidz. Pasal 34 Anggaran Dasar menyebutkan bahwa tanfidz merupakan pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah pada masing-masing tingkat. Keputusan tersebut berlaku setelah ditanfidzkan dan dalam pelaksanaannya harus bersifat redaksional, mempertimbangkan kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ketentuan ini memberikan dasar normatif bahwa kebijakan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen harus memiliki pijakan organisatoris yang jelas serta memperhatikan kemaslahatan dalam pelaksanaannya.

Kebijakan organisasi pada akhirnya berkaitan pula dengan pengelolaan sumber daya dan pertanggungjawaban organisasi. Pasal 35 Anggaran Dasar menetapkan bahwa keuangan dan kekayaan Muhammadiyah merupakan harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah. Pasal 36 mengatur beberapa sumber keuangan organisasi, sedangkan Pasal 37 menyerahkan ketentuan pengelolaan dan pengawasan keuangan kepada Anggaran Rumah Tangga. Selanjutnya, Pasal 38 mewajibkan pimpinan Muhammadiyah pada semua tingkatan membuat laporan perkembangan organisasi serta laporan pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan organisasi tidak hanya berkaitan dengan penetapan program, melainkan mencakup pengelolaan sumber daya dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kebijakan organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen dapat dipahami sebagai rangkaian keputusan dan tindakan organisatoris yang berlandaskan tujuan Muhammadiyah, dilaksanakan melalui struktur organisasi, dirumuskan melalui mekanisme permusyawaratan, serta diwujudkan melalui amal usaha, program, dan kegiatan. Pimpinan Daerah memiliki posisi sentral dalam mengimplementasikan kebijakan pimpinan di atasnya sekaligus mengoordinasikan pelaksanaannya pada tingkat cabang dan ranting. Kebijakan tersebut perlu diarahkan pada penguatan struktur organisasi, pelaksanaan dakwah dan tajdid, pengembangan amal usaha, pembinaan organisasi otonom, pengelolaan sumber daya, serta pertanggungjawaban organisasi. Dengan pola

tersebut, perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen dapat dilihat bukan semata-mata dari bertambahnya struktur organisasi, melainkan dari kemampuan organisasi menjalankan kebijakan secara konsisten sesuai dengan Anggaran Dasar dan tujuan Persyarikatan.

4.2 Bentuk-Bentuk Permasalahan yang Dihadapi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen

Perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang memengaruhi pelaksanaan dakwah, pembinaan organisasi, serta pengembangan amal usaha. Permasalahan tersebut muncul dari faktor internal organisasi maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat. Dinamika tersebut menjadi bagian dari perjalanan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang menjalankan gerakan dakwah dan pembaruan di tengah masyarakat Bireuen.

Permasalahan internal berkaitan dengan kondisi organisasi, terutama yang menyangkut sumber daya manusia, kaderisasi, dan kemampuan pendanaan. Ketiga aspek tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan program kerja serta kemampuan organisasi dalam mempertahankan eksistensinya. Keterbatasan pada aspek internal sering kali menyebabkan pelaksanaan kegiatan organisasi tidak dapat berjalan secara optimal.

Permasalahan eksternal berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat, perbedaan pandangan keagamaan, serta hubungan organisasi dengan pemerintah dan organisasi Islam lainnya. Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen berada dalam lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat sehingga proses

dakwah dan pengembangan organisasi menghadapi tantangan tersendiri.

Perbedaan kondisi sosial di setiap kecamatan menyebabkan bentuk permasalahan yang dihadapi Muhammadiyah tidak selalu sama. Beberapa cabang dapat berkembang dengan baik karena memperoleh dukungan masyarakat, sedangkan cabang lainnya memerlukan waktu yang lebih panjang untuk memperoleh penerimaan yang luas. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan organisasi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial di masing-masing wilayah.

Hambatan yang dihadapi Muhammadiyah tidak selalu menjadi faktor penghambat keberlangsungan organisasi. Berbagai permasalahan justru menjadi pengalaman yang mendorong organisasi untuk melakukan pembenahan, memperkuat solidaritas internal, serta meningkatkan kualitas dakwah dan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Permasalahan organisasi perlu dipahami sebagai bagian dari proses perkembangan yang wajar dalam sebuah organisasi kemasyarakatan. Setiap organisasi memiliki tantangan yang berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat, sumber daya yang dimiliki, serta kemampuan pengurus dalam menjalankan fungsi organisasi.

Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen tetap menunjukkan upaya untuk mempertahankan eksistensinya meskipun menghadapi berbagai kendala. Konsistensi dalam menjalankan dakwah dan pembinaan masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat organisasi ini tetap berkembang di tengah berbagai tantangan yang ada.

Kemampuan organisasi dalam mengelola permasalahan internal dan eksternal akan sangat menentukan keberlangsungan Muhammadiyah pada masa yang akan datang. Organisasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi Muhammadiyah penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat perkembangan organisasi. Pemahaman tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah strategis guna memperkuat organisasi di masa mendatang.⁵⁰

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang dihadapi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk utama, yaitu permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Kedua bentuk permasalahan tersebut saling berkaitan dan memengaruhi perkembangan organisasi secara keseluruhan.

4.2.1 Permasalahan Internal

Permasalahan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam organisasi dan berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kaderisasi, serta pendanaan organisasi.⁵¹

⁵⁰ Dimas Ageng Prayogo et al., "Strategi Menyikapi Tantangan Dan Peluang Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi: Tinjauan Literatur," *Journal of Comprehensive Science* 2, no. 11 (2023): 1879–1889.

⁵¹ Listiyani Siti Romlah et al., "Peran Pemimpin Dalam Menyelesaikan Permasalahan Internal (Studi Di Uin Raden Intan Lampung)," *AT-TAJDID: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 7, no. 2 (2023): 363–371.

Sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan penting yang dihadapi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen. Ketersediaan anggota yang memiliki kemampuan manajerial, pengalaman organisasi, dan komitmen yang tinggi masih belum merata pada setiap cabang maupun ranting.

Sebagian besar aktivitas organisasi masih bergantung pada tokoh-tokoh tertentu yang telah lama aktif di Muhammadiyah. Kondisi tersebut menyebabkan beban organisasi sering kali terpusat pada sejumlah pengurus sehingga proses pelaksanaan program tidak berjalan secara maksimal.

Keterbatasan sumber daya manusia berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dakwah, administrasi organisasi, serta pengembangan amal usaha. Organisasi memerlukan anggota yang tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan, tetapi juga kemampuan dalam pengelolaan organisasi.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan kaderisasi. Regenerasi kepemimpinan menjadi kebutuhan penting agar keberlangsungan organisasi dapat terus terjaga. Kaderisasi berfungsi untuk mempersiapkan generasi penerus yang mampu melanjutkan perjuangan Muhammadiyah.

Partisipasi generasi muda dalam kegiatan organisasi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Kesibukan pendidikan, pekerjaan, serta berkurangnya minat terhadap aktivitas organisasi menyebabkan proses regenerasi berlangsung lebih lambat dibandingkan kebutuhan organisasi.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara generasi senior dan generasi muda dalam kepengurusan. Organisasi memerlukan kader-kader baru yang mampu membawa gagasan serta semangat baru tanpa

meninggalkan nilai-nilai dasar Muhammadiyah.

Pendanaan menjadi permasalahan internal lain yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan organisasi. Pelaksanaan program dakwah, kegiatan sosial, pembangunan sarana, serta operasional organisasi memerlukan dukungan dana yang memadai.

Sumber pendanaan Muhammadiyah pada umumnya berasal dari kontribusi anggota, donatur, dan dukungan masyarakat. Keterbatasan dana menyebabkan beberapa program organisasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal atau harus dilakukan secara bertahap.

Kemampuan organisasi dalam mengembangkan sumber pendanaan yang berkelanjutan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen. Kemandirian finansial akan memberikan ruang yang lebih besar bagi organisasi untuk menjalankan berbagai program secara optimal.

Permasalahan sumber daya manusia, kaderisasi, dan pendanaan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas internal organisasi masih menjadi pekerjaan penting bagi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen. Pembenahan pada aspek internal akan sangat menentukan keberlangsungan organisasi di masa depan.

4.2.2 Permasalahan Eksternal

Permasalahan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari lingkungan di luar organisasi dan berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, perbedaan pandangan, serta hubungan dengan pemerintah maupun organisasi lain.⁵² Respon

⁵² Reza Hendriyantore, "Tata Kelola Internal Dan Eksternal Untuk Mengatasi Permasalahan Pangan Di Indonesia," *Jurnal Good Governance* 13, no. 1 (2018): 1–4.

masyarakat terhadap Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen tidak selalu sama. Sebagian masyarakat dapat menerima keberadaan Muhammadiyah dengan baik, sedangkan sebagian lainnya masih memiliki pandangan yang berbeda terhadap organisasi tersebut.

Perbedaan tingkat penerimaan masyarakat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan pemahaman keagamaan yang berkembang di masing-masing wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan Muhammadiyah di setiap kecamatan berlangsung dengan dinamika yang berbeda.

Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* sering kali dipandang berbeda oleh sebagian masyarakat karena memiliki pemahaman tertentu mengenai pelaksanaan ibadah dan praktik keagamaan. Perbedaan tersebut terkadang menimbulkan kesalahpahaman mengenai tujuan dakwah Muhammadiyah.

Perbedaan pemahaman keagamaan menjadi salah satu tantangan yang cukup menonjol dalam perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen. Masyarakat Bireuen dikenal memiliki tradisi keagamaan yang kuat sehingga setiap perbedaan praktik ibadah sering memperoleh perhatian yang besar.

Perbedaan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari keragaman pemikiran dalam Islam. Kondisi tersebut dapat dikelola dengan baik apabila seluruh pihak mengedepankan sikap saling menghormati dan menjaga ukhuwah Islamiyah.

Dinamika tersebut pernah terlihat dalam persoalan pembangunan Masjid At-Taqwa Muhammadiyah di Kecamatan Juli pada tahun 2015. Proses pembangunan masjid sempat menghadapi penolakan, teror, serta hambatan dalam memperoleh rekomendasi meskipun persyaratan administratif telah dipenuhi.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman keagamaan dapat berpengaruh terhadap aktivitas organisasi di tengah masyarakat. Muhammadiyah memerlukan pendekatan dakwah yang persuasif agar keberadaannya dapat diterima secara lebih luas.

Hubungan dengan pemerintah dan organisasi lain juga menjadi bagian dari tantangan eksternal yang dihadapi Muhammadiyah. Kerja sama yang baik dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial.

Koordinasi dengan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi seluruh organisasi kemasyarakatan. Dukungan pemerintah dapat membantu menjaga ketertiban, memperkuat kerukunan, serta mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antarkelompok masyarakat.

Permasalahan eksternal yang berkaitan dengan respon masyarakat, perbedaan pemahaman keagamaan, dan hubungan antarlembaga menunjukkan bahwa Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen tidak hanya dituntut untuk memperkuat organisasi dari dalam, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat.

4.3 Harapan Organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen

Perkembangan organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen diukur dari capaian yang telah diraih dan harapan yang ingin diwujudkan pada masa mendatang. Harapan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah gerak organisasi agar tetap mampu menjalankan fungsi dakwah, pendidikan, dan

pelayanan sosial di tengah perubahan masyarakat. Dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang menuntut Muhammadiyah untuk melakukan berbagai penyesuaian tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar organisasi yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Harapan tersebut lahir dari pengalaman organisasi dalam menghadapi berbagai dinamika selama proses perkembangannya. Berbagai tantangan yang pernah dihadapi menjadi bahan evaluasi bagi pengurus untuk menyusun langkah-langkah yang lebih efektif dalam memperkuat keberadaan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas organisasi sekaligus memperluas manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

4.3.1 Harapan Pengurus Muhammadiyah

Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Bireuen memiliki harapan agar organisasi terus berkembang sebagai gerakan Islam yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Harapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya jumlah anggota, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, serta pembinaan umat secara berkelanjutan. Keberhasilan organisasi pada masa mendatang dipandang sangat bergantung pada kemampuan seluruh unsur Muhammadiyah dalam menjaga semangat persatuan dan kerja sama.⁵³

Penguatan kaderisasi menjadi salah satu harapan utama yang terus disampaikan oleh pengurus. Keberlangsungan organisasi sangat ditentukan oleh hadirnya generasi penerus yang memiliki pemahaman terhadap ideologi

⁵³ Wawancara dengan MM, Panitia Pembangunan, pada tanggal 04 Juli 2026.

Muhammadiyah sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Proses kaderisasi yang berjalan secara berkesinambungan diharapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang memiliki integritas, kemampuan manajerial, dan komitmen terhadap kemajuan organisasi.

Harapan berikutnya berkaitan dengan pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Pengurus menginginkan agar keberadaan amal usaha di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan dapat terus ditingkatkan sehingga manfaat organisasi semakin dirasakan oleh masyarakat. Amal usaha dipandang sebagai salah satu identitas Muhammadiyah yang mampu menjadi sarana dakwah sekaligus media pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian penting. Pengurus berharap anggota Muhammadiyah tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang baik, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas dalam bidang pendidikan, teknologi, organisasi, dan kepemimpinan. Kemampuan tersebut diperlukan agar Muhammadiyah tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin dinamis.

Harapan lain diarahkan pada terciptanya hubungan yang semakin harmonis dengan seluruh elemen masyarakat. Perbedaan pandangan keagamaan yang pernah muncul diharapkan tidak lagi menjadi penghalang dalam membangun kerja sama untuk kepentingan umat. Kehidupan masyarakat yang rukun dan saling menghormati diyakini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi Muhammadiyah untuk menjalankan berbagai program dakwah dan pelayanan sosial.

4.3.2 Upaya Mewujudkan Harapan Muhammadiyah

Berbagai harapan tersebut memerlukan langkah nyata agar dapat diwujudkan secara bertahap. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memperkuat sistem kaderisasi melalui pembinaan anggota sejak usia muda. Kegiatan pengajian, pelatihan kepemimpinan, serta pembinaan organisasi menjadi sarana untuk mempersiapkan kader yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan Muhammadiyah di masa mendatang.

Peningkatan kualitas program dakwah juga menjadi langkah strategis yang harus terus dikembangkan. Dakwah tidak hanya dilaksanakan melalui ceramah keagamaan, tetapi juga melalui kegiatan pendidikan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebaran informasi keislaman. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama kalangan generasi muda.⁵⁴

Kerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya juga perlu terus diperkuat. Sinergi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program organisasi. Hubungan yang baik akan mempermudah koordinasi dalam bidang pendidikan, kegiatan sosial, penanggulangan bencana, maupun pembinaan kehidupan keagamaan di Kabupaten Bireuen.

Optimalisasi pengelolaan amal usaha menjadi upaya lain yang perlu mendapat perhatian. Amal usaha yang dikelola secara profesional akan memberikan

⁵⁴ Rizky Primadani and Waizul Qarni, "Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Meningkatkan Kualitas Program Dakwah Di Masjid Raya Pematang Siantar," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 7, no. 2 (2026): 130–140.

manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian organisasi. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah dan pelayanan sosial.⁵⁵

Penguatan komunikasi internal organisasi turut menjadi bagian penting dalam mewujudkan harapan Muhammadiyah. Hubungan yang harmonis antara pimpinan daerah, cabang, ranting, dan seluruh anggota akan menciptakan koordinasi yang lebih efektif dalam menjalankan program kerja. Komunikasi yang baik juga mampu meminimalkan terjadinya kesalahpahaman sehingga setiap kebijakan organisasi dapat dilaksanakan secara optimal.⁵⁶

Berdasarkan keseluruhan harapan di atas, Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen menunjukkan adanya komitmen untuk terus berkembang sebagai organisasi Islam yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan diharapkan mampu memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas amal usaha, serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat. Melalui langkah tersebut, Muhammadiyah diharapkan tetap mampu menjalankan perannya sebagai gerakan dakwah Islam berkemajuan yang berkontribusi terhadap pembangunan kehidupan keagamaan, pendidikan, dan sosial di Kabupaten Bireuen pada masa yang akan datang

⁵⁵ Nurma Idatul Jannah, “Analisis Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat (Studi Pada Amal Usaha Wakaf Produktif Yayasan Panti Asuhan KH. Mas Mansyur (Air Minum Q-Mas M) Kota Malang Jawa Timur),” 2018, 11–14.

⁵⁶ Karlina Gusmarani and Rajiyem, “Strategi Komunikasi Internal Dalam Perubahan Organisasi Di Masa Transisi Tahun 2019-2020,” *Jurnal Manajemen Komunikasi* 6, no. 2 (2022): 137–140.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen berlangsung secara bertahap melalui proses dakwah, pendidikan, dan pembinaan masyarakat. Penyebaran organisasi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui perjuangan para tokoh Muhammadiyah yang memperkenalkan nilai-nilai tajdid di tengah masyarakat Bireuen yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Perkembangan tersebut terlihat dari berdirinya cabang-cabang Muhammadiyah di beberapa kecamatan seperti Gandapura, Peusangan, Kota Juang, Juli, Kuala, Kuta Blang, dan Samalanga. Meskipun tingkat perkembangannya berbeda pada setiap wilayah, Muhammadiyah mampu mempertahankan eksistensinya melalui kegiatan dakwah, pengajian, pendidikan, serta pelayanan sosial yang terus dilakukan secara berkesinambungan.

Selanjutnya, Perkembangan kepengurusan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen menunjukkan adanya peningkatan dalam tata kelola organisasi. Kepengurusan dibentuk melalui mekanisme musyawarah sesuai dengan ketentuan organisasi sehingga menghasilkan struktur yang mampu menjalankan fungsi dakwah, kaderisasi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat secara lebih terarah. Koordinasi antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan pimpinan cabang dan ranting semakin memperkuat pelaksanaan program kerja organisasi. Regenerasi kepemimpinan mulai menjadi perhatian penting sebagai upaya menjaga kesinambungan organisasi agar tetap mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Muhammadiyah.

Perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang memengaruhi pelaksanaan dakwah, pembinaan organisasi, serta pengembangan amal usaha. Permasalahan tersebut muncul dari faktor internal organisasi maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat.

Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen memiliki harapan agar organisasi terus berkembang sebagai gerakan Islam yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan kaderisasi menjadi salah satu harapan utama yang terus disampaikan oleh pengurus. Keberlangsungan organisasi sangat ditentukan oleh hadirnya generasi penerus yang memiliki pemahaman terhadap ideologi Muhammadiyah sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Harapan selanjutnya berkaitan dengan pengembangan amal usaha Muhammadiyah, harapan lain diarahkan pada terciptanya hubungan yang semakin harmonis dengan seluruh elemen masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen diharapkan dapat memperkuat pembinaan organisasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem kaderisasi, serta pengembangan kepemimpinan di tingkat cabang dan ranting. Pembinaan yang berkelanjutan diperlukan agar organisasi memiliki kader-kader yang kompeten, memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Muhammadiyah, dan mampu menjawab tantangan perkembangan

zaman.

Kemudian, Bagi Muhammadiyah Kabupaten Bireuen diharapkan mampu mengembangkan kemandirian organisasi melalui penguatan sumber pendanaan dan pengembangan amal usaha yang produktif. Kemandirian finansial akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program dakwah, pendidikan, kegiatan sosial, serta pembangunan sarana organisasi sehingga aktivitas Muhammadiyah dapat berlangsung secara berkesinambungan tanpa bergantung pada sumber dana yang terbatas.

Selanjutnya, bagi masyarakat Kabupaten Bireuen, diharapkan dapat membangun sikap saling menghormati terhadap perbedaan pandangan dalam praktik keagamaan selama tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Perbedaan pemahaman hendaknya dijadikan sebagai bagian dari khazanah pemikiran Islam yang dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan sikap saling menghargai sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif.

Kemudian, bagi pemerintah daerah, Kementerian Agama, serta para tokoh agama di Kabupaten Bireuen diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan seluruh organisasi kemasyarakatan Islam, termasuk Muhammadiyah. Dukungan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak setiap organisasi yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum, menjaga kerukunan umat, serta menciptakan iklim kehidupan beragama yang damai, adil, dan inklusif di Kabupaten Bireuen.

Selanjutnya, bagi peneliti, diharapkan dapat mengembangkan penelitian

mengenai Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen dengan cakupan yang lebih luas, seperti mengkaji kontribusi amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pemberdayaan masyarakat. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran Muhammadiyah dalam pembangunan sosial dan kehidupan keagamaan di Kabupaten Bireuen.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, M. Hasbi. *Aceh dan Serambi Makkah*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006.
- Apollo. *Fenomenologi dan Metode*. Yogyakarta: PT Nas Media Indonesia.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suryadi, Ahmad. *Menapak Indonesia: Menelusuri Setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota Seluruh Indonesia*. Jilid I (Pulau Sumatera). Sukabumi: CV Jejak, 2021.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Waryanti, Sri. *Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Aceh*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2005.

Jurnal

- Adam, Haidar. "Kedudukan Hukum Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024).
- Asmaria Purba, Isma, dan Ponirin. "Perkembangan Amal Usaha Organisasi Muhammadiyah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan." *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah (JASIKA)* 1, no. 2 (2013).
- Aziz Mubaroq, Ahmad, Nasrullah Yufi Mohammad, dan Hilda Ainissyifa. "Implementasi Sikap Moderasi dalam Organisasi Islam di Indonesia." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 1 (2026).
- Adista, Ayu Aulia, et al. "Implementasi Intervensi Komunitas: Sosialisasi Kepemimpinan untuk Regenerasi Pengurus Karang Taruna di Desa Wringinanom." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 4, no. 1 (2024).
- Bakiyah, H. "Identifikasi Fungsi Kehumasan Universitas Muhammadiyah Jakarta (Studi Kasus Pandangan Koalisi Dominan Universitas Muhammadiyah Jakarta terhadap Fungsi Kehumasan Universitas Muhammadiyah Jakarta)." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2019).
- Fadli, M. "Pertumbuhan dan Perkembangan Organisasi-Organisasi Islam: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Jami'atul Washliyah." *Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan* 5, no. 3 (2021).
- Ferihana. "Perkembangan Amal Usaha Muhammadiyah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan." *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah (JASIKA)* 2, no. 2 (2022).
- Hamzah, Faizal, dkk. "The History of Muhammadiyah." *Journal of Indonesian History* 11, no. 1 (2023).

- Haq, Andri Moewashi Idharoel, dan Sistiana Windyariani. "Program Penguatan Cabang dan Ranting Muhammadiyah di Sukabumi." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2015).
- Hendriyantore, Reza. "Tata Kelola Internal dan Eksternal untuk Mengatasi Permasalahan Pangan di Indonesia." *Jurnal Good Governance* 13, no. 1 (2018).
- Luthfiyah Trini, H., dkk. "Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 7, no. 2 (2022).
- Prayogo, Dimas Ageng, et al. "Strategi Menyikapi Tantangan dan Peluang Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi: Tinjauan Literatur." *Journal of Comprehensive Science* 2, no. 11 (2023).
- Rahmat, Mamat. "Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam di Indonesia." *Tsamratul Fikri* 17, no. 1 (2023).
- Romlah, Listiyani Siti, et al. "Peran Pemimpin dalam Menyelesaikan Permasalahan Internal (Studi di UIN Raden Intan Lampung)." *AT-TAJDID: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 7, no. 2 (2023).
- Sahadi, Neti Sunarti, dan Endah Puspitasari. "Pengembangan Organisasi (Tinjauan Umum pada Semua Organisasi)." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022).
- Syah, Iskandar, dan Zuriyah Amnar. "Harmonisasi Intra Umat Beragama di Kabupaten Bireuen Pasca Konflik antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* 13, no. 2 (2022).
- Suciningtyas, Richa, dkk. "Muhammadiyah sebagai Gerakan Berkemajuan." *PENA: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 1 (2025).
- Suhendra, Ahmad. "Rekonstruksi Peran dan Hak Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam." *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 11, no. 1 (2012).
- Tridayatna AS, Weli. "Sejarah dan Peran Muhammadiyah di dalam Pendidikan." *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*.
- Yamin, Muhammad. "Strategi Penerapan Manajemen Kurban Warga Muhammadiyah Aceh." *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh* 10, no. 2 (2020).
- Zain, Arifin, Maimun, dan Maimun Fuadi. "Internalisasi Nilai-Nilai Modernitas dalam Gerakan Dakwah Organisasi Muhammadiyah di Aceh." *Al-Idarah* 1, no. 1 (2017).
- Zarro, Mar'ati, Yunani, dan Aulia Novemy Dhita. "Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Pendidikan." *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2020).
- Zuriyah, dan Syah Iskandar. "Harmonisasi Intra Umat Beragama di Kabupaten Bireuen

Pasca Konflik antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.” *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam* 13, no. 2 (2022).

Skripsi

Hasimida. *Perkembangan Muhammadiyah di Gampong Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (2009–2017)*. Skripsi. Program Studi Sosiologi Agama, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Nazila, Intan. *Dinamika Perkembangan Muhammadiyah di Bireuen (2000–2019)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

Website

Muhammadiyah. “Sejarah Singkat Muhammadiyah.” Diakses 14 Juli 2026. <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>

Maimun, “Kabupaten Bireuen Dalam Angka 2025 Bireuen Regency in Figures 2025”, <https://bireuenkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/48455492d90b94b51c8a8459/bireuen-regency-in-figures-2025.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2026.

Pemerintah Kabupaten Bireun, “Demografi”, <https://www.bireuenkab.go.id/halaman/demografi>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2026.

RMOL. “Kepengurusan PP Muhammadiyah 2022–2027 Terbentuk, Ini Susunannya.” Diakses 21 Juli 2026. <https://rmol.id/politik/read/2022/12/16/557323/kepengurusan-pp-muhammadiyah-2022-2027-terbentuk-ini-susunannya>

Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline. Diakses 26 April 2025.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Mulyadi (Sekretaris Muhammadiyah Bireuen) pada tanggal 3 Juli, 2026

Wawancara dengan Bapak Rusdi Habib (Masyarakat Muhammadiyah) pada tanggal 2 Juli, 2026

Wawancara dengan M. Yahya Arsyad (Pimpinan Muhammadiyah Samalanga) pada tanggal 4 Juli, 2026

Wawancara dengan Bapak Mukhtar Majid (Masyarakat Muhammadiyah) pada tanggal 4 Juli, 2026

Wawancara dengan Fauzan Azima (Mahasiswa) pada tanggal 27 April, 2026

Peraturan/ Dokumen Organisasi

Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2023.

Laporan

Syhabuddin. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bireuen Tahun 2019*. Bireuen: Inspektorat Kabupaten Bireuen, 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I (Surat Keputusan)



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 792/Un.08/FAH/KP.004/03/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI/KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi/karya ilmiah/tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir tersebut;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2023 tentang Panduan Akademik bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 200 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI/KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.

- Kesatu : Menunjuk saudara :
- 1). Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag (Pembimbing Pertama)
- 2). Ahmad Fauzan, M.Ag (Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi mahasiswa

Nama : Afzalul Fatha

Nim : 220501002

Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Judul : Sejarah Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen.

Masa Bimbingan : Enam Bulan TMT 10 Maret 2026 s/d 10 September 2026

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka skripsi/karya ilmiah/tugas akhir tersebut dengan sepengetahuan fakultas.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 09 Maret 2026
Dekan,


Syarifuddin

- Tembusan :
1. Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
2. Pembimbing skripsi karya ilmiah tugas akhir
3. Dosen Penasihat Akademik yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran II (Surat Penelitian)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1903/Un.08/FAH.I/PP.000.9/06/2026
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Pimpinan Muhammadiyah Bireuen
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220501002
Nama : AFZALUL FATHA
Program Studi/Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Alamat : jalan T Johan Meunasah Puuk

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SEJARAH PERKEMBANGAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN BIREUEN**

Banda Aceh, 17 Juni 2026
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Nazaruddin, S.Ag., S.S., M.L.I.S., Ph.D.
NIP. 197101101999031002

Berlaku sampai : 17 September 2026

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran III

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana Anda memandang keberadaan dan peran organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana perkembangan organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen dari awal berdiri hingga saat ini?
3. Apa saja bentuk perkembangan Muhammadiyah yang dapat dilihat dari aspek kelembagaan, keanggotaan, dan kegiatan organisasi di Kabupaten Bireuen?
4. Apa saja kegiatan dan program yang selama ini dilaksanakan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan?
5. Bagaimana peran Muhammadiyah dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Kabupaten Bireuen?
6. Bagaimana pola interaksi dan hubungan Muhammadiyah dengan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan organisasi?
7. Bagaimana hubungan dan bentuk kerja sama Muhammadiyah dengan pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi?
8. Apa saja faktor yang mendukung perkembangan organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen?
9. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam mempertahankan serta mengembangkan eksistensinya di Kabupaten Bireuen?
10. Bagaimana upaya Muhammadiyah dalam mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan organisasi?
11. Program atau kegiatan apa yang dinilai paling efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran keagamaan masyarakat di Kabupaten Bireuen?
12. Bagaimana keterlibatan generasi muda dalam kegiatan Muhammadiyah dan

sejauh mana perannya dalam mendukung keberlanjutan organisasi?

13. Bagaimana pandangan Anda terhadap kontribusi Muhammadiyah terhadap perkembangan kehidupan masyarakat di Kabupaten Bireuen?
14. Apa harapan dan arah pengembangan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen pada masa yang akan datang?



Lampiran V

DAFTAR INFORMAN

Nama : M. Yahya Arsyad
Umur : 81 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pimpinan Muhammadiyah Samalanga

Nama : Mukhtar Majid
Umur : 65 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Anggota Muhammadiyah

Nama : Mulyadi
Umur : 53 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Sekretaris Muhammadiyah Bireuen

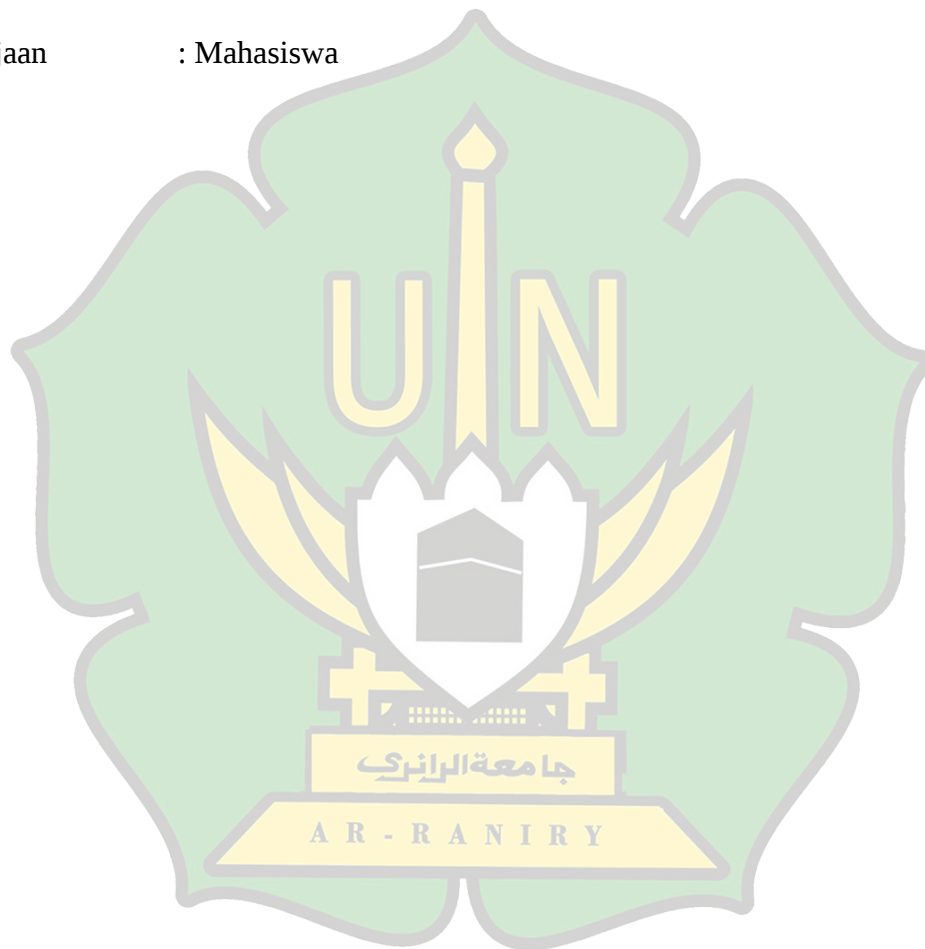
Nama : Rusdi Habib
Umur : 73 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Anggota Muhammadiyah

Nama : Fauzan Azima

Umur : 22 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa



Lampiran VI

DOKUMENTASI



Foto VI Wawancara dengan M. Yahya Arsyad dan Mukhtar majib (Pimpinan Muhammadiyah Samalanga dan Anggota Muhammadiyah) 14 Juli 2026, Samalanga



Foto VII Wawancara dengan Rusdi Habib (Masyarakat Muhammadiyah) 02 Juli 2026, Kota Juang



Foto VIII Wawancara dengan Mulyadi (Sekretaris Muhammdiyah Bireuen) 03 Juli 2026, Kota Juang

